



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : **TI.005 / 1 / 19 PDTI - 2023**
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Terkait Hasil
Clearence TIK Tahun
Anggaran 2023

Jakarta, **05** Januari 2023

Yth. Daftar Nama Terlampir

Menindaklanjuti Surat:

1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika nomor: 1029/DJAI/PR.01.01/12/2022 dan nomor: B/1406/KT.03/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika nomor: 1038/DJAI/PR.01.01/12/2022 dan nomor: B/1406/KT.03/2022 tanggal 14 Desember 2022 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika nomor: 5/DJAI/PR.01.01/01/2023 dan nomor: B/09/KT.03/2023 tanggal 2 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dengan ini kami sampaikan daftar kegiatan TIK yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenpan-RB dan Kemenkominfo untuk dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan catatan hasil reuiu (CHR) pada lampiran surat rekomendasi reuiu Pusdatin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi,

Capt. Avirianto S, S.Pd., MM.
NIP. 19651120 199003 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kemenhub;
3. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Biro LPPBMN.

Lampiran Surat Kapusdatin

Nomor : **TI.005/1/19 PDTI.2023**

Tanggal : **05** Januari 2023

Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Prekeretaapian;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
5. **Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;**
6. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
7. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
8. Kapusdatin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.





**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : 1029/DJAI/PR.01.01/12/2022 Jakarta, 13 Desember 2022
Nomor : B/1406/KT.03/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran
Belanja SPBE Tahun 2023 di Lingkup
Kementerian Perhubungan

Yth. .

- 1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/8 PHB.2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Perihal Permohonan Clearance Tahap I Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai surat nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 dan nomor S-353/MK.02/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai surat nomor 17 Tahun 2022 dan nomor 4 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- (*Clearance*) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE, melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>, dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
 - b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur TIK atau penambahan kapasitas yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2023 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
 - b. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur TIK yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran II surat ini;
 - c. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK pada huruf a dan b, Kementerian Perhubungan agar melakukan:

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

1. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat Nasional;
3. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
4. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;

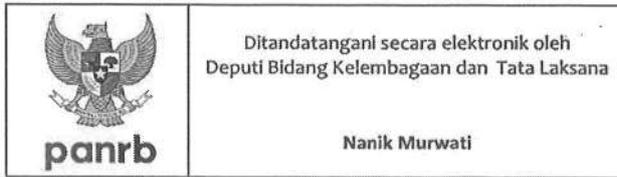
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, agar dapat melanjutkan mata anggaran untuk kegiatan pembangunan/pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur TIK yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 huruf a dan b. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

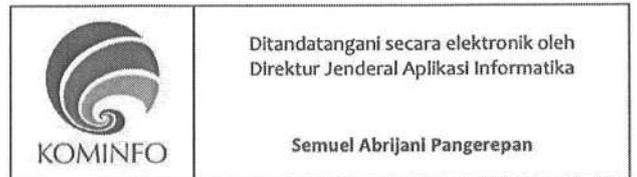
Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Deputi Bidang Kelembagaan dan
Tata Laksana**



Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

LAMPIRAN I

NOMOR : 1029/DJAI/PR.01.01/12/2022

NOMOR : B/1406/KT.03/2022

TANGGAL : 13 Desember 2022

**HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan/KRO/RO	Aplikasi	Anggaran
1	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.BMA. Data dan Informasi Publik / 3996.BMA.008. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Laut	Sistem Informasi Diklat Keterampilan Pelaut	200,000,000
2	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.BMA. Data dan Informasi Publik / 3996.BMA.008. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Laut	Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	200,000,000
3	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.BMA. Data dan Informasi Publik / 3996.BMA.009. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan SMART CAMPUS	1,011,000,000
4	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian	1,250,000,000
5	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi /	Portal Web Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok	358,300,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

		4661.CDS.001. OM Software		
6	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CBT.001. Software	Pengelolaan Data Ditjen Hubla - Bag. Organisasi dan Humas	200,000,000
7	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CBT.001. Software	Pemeliharaan Aplikasi SEHATI - Bag. Organisasi dan Humas	1,200,000,000
8	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CBT.001. Software	Pemeliharaan Aplikasi SIRANI Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas	200,000,000
9	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CBT.001. Software	Pemeliharaan Portal Ditjen Hubla Bag. Organisasi dan Humas	200,000,000
10	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.001. Software	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Maintenance Kapal (SIPERKAPAL)	700,000,000
11	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.001. Software	SEACOMM (Shipping Enterprises Alliance Communication Media)	500,000,000
12	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.001. Software	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kapal Perintis (SIPERINTIS)	500,000,000
13	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CDS.001. OM Software	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Tol Laut (SITOLAUT)	2,000,000,000
14	022.04. Ditjen	4659. Pelayanan Transportasi Laut /	Pemeliharaan Sistem	2,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

	Perhubungan Laut	4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.001. Software	Pelayanan Terpadu (SIMPADU) dan Sistem Persetujuan Syahbandar (SPS)	
15	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.001. Software	Sistem Inaportnet, Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPADU), dan Sistem Persetujuan Syahbandar (SPS)	2,600,000,000
16	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CDS.001. OM Software	Pemeliharaan dan Reengineering Aplikasi Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut	2,200,000,000
17	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CDS.001. OM Software	Perawatan Aplikasi Penunjang Untuk Aplikasi BBM dan Manifest Kapal Milik Negara	400,000,000
18	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CDS.001. OM Software	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIJUKA	400,000,000
19	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4660. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut / 4660.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4660.CDS.001. OM Software	Updating Data dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pemanduan dan Penudaan Kapal	200,000,000
20	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CBT.001. Software	Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran (SIKELINK)	200,000,000
21	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi /	Website dan Aplikasi [Siskespi, Sidokla, e-Approval, i-Clinic, e-	245,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

		4661.CDS.001. OM Software	Office, SIPETE]	
22	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.BMA. Data dan Informasi Publik / 3996.BMA.009. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	Pengembangan Content Management System (Website, PPID dan SIAKAD)	1,011,000,000
23	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.BMA. Data dan Informasi Publik / 3996.BMA.009. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	Update Website dan Sistem Informasi Akademik	400,000,000
24	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4660. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut / 4660.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4660.CDS.001. OM Software	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Fasilitas Pelabuhan (SIFASPEL)	250,000,000
25	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Electronic Seafarer Identity Document E-SID	3,899,190,000
26	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CDS.001. OM Software	Langganan Airtime LRIT	3,500,000,000
27	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CDS.001. OM Software	Langganan Airtime Sat AIS Data Subscription	2,500,000,000
28	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.001. Software	Pengadaan Perangkat dan Pengembangan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan	3,825,000,000
29	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan	Pengadaan Perangkat dan Pengembangan E-Pass Kecil	4,381,258,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

		Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware		
30	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CDS.002. OM Hardware	Pemeliharaan Software SIMAKESPEL	195,470,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN II

NOMOR : 1029/DJAI/PR.01.01/12/2022
NOMOR : B/1406/KT.03/2022
TANGGAL : 13 Desember 2022

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR INFRASTRUKTUR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan/KRO/RO	Infrastruktur	Anggaran
1	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.BMA. Data dan Informasi Publik / 3996.BMA.008. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Laut	Lisensi Firewall Fortigate FG-201E	70,000,000
2	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1975. Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi / 1975.BMA. Data dan Informasi Publik / 1975.BMA.002. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Laut	Lisensi server	181,500,000
3	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1975. Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi / 1975.BMA. Data dan Informasi Publik / 1975.BMA.002. Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Laut	Lisensi Firewall	148,500,000
4	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.001. Software	Pengadaan Perangkat Keras Untuk Pendukung Sistem Aplikasi Inaportnet 2023	8,000,000,000
5	022.04. Ditjen	4659. Pelayanan Transportasi Laut /	Perpanjangan Lisensi	1,200,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

	Perhubungan Laut	4659.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CDS.001. OM Software	Sistem Informasi Pelayanan Publik	
6	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CDS.002. OM Hardware	Manage Service Infrastruktur dan Supporting System Migrasi Infrastruktur	2,500,000,000
7	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CDS.002. OM Hardware	Manage Service Datin Hubla (Sihublavc)	200,000,000
8	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.001. Software	IMO Vega on Web	210,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : 1038/DJAI/PR.01.01/12/2022
Nomor : B/1406/KT.03/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran
Belanja SPBE Tahun 2023 di Lingkup
Kementerian Perhubungan

Jakarta, 14 Desember 2022

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/10 PTIKP.2022 Tanggal 02 November 2022 Perihal Permohonan Clearance Tahap II Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai surat nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 dan nomor S-353/MK.02/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai surat nomor 17 Tahun 2022 dan nomor 4 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

(*Clearance*) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE, melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>, dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
 - b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur TIK atau penambahan kapasitas yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2023 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
 - b. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur TIK yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran II surat ini;
 - c. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK pada huruf a dan b, Kementerian Perhubungan agar melakukan:

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

1. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat Nasional;
3. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
4. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;

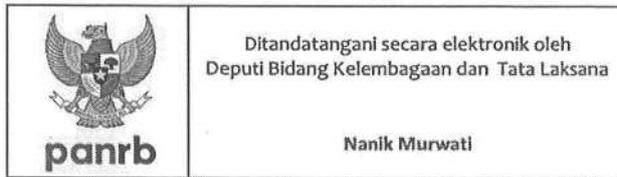
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, agar dapat melanjutkan mata anggaran untuk kegiatan pembangunan/pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur TIK yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 huruf a dan b. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

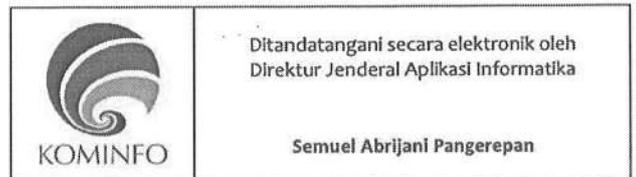
Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**Deputi Bidang Kelembagaan dan
Tata Laksana**



Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

LAMPIRAN I

NOMOR : 1038/DJAI/PR.01.01/12/2022

NOMOR : B/1406/KT.03/2022

TANGGAL : 14 Desember 2022

**HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan/KRO/RO	Aplikasi	Anggaran
1	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CCL. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CCL.001. Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan dan Pemeliharaan Data Aplikasi Keterbukaan Informasi Angud Angud Online	200,000,000
2	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CCL. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CCL.001. Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Direktorat Angkutan Udara	200,000,000
3	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CCL. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CCL.001. Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Data Base Perizinan Terintegrasi Dengan OSS	200,000,000
4	022.05. Ditjen	4646. Keselamatan dan Keamanan	Pengembangan dan	200,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

	Perhubungan Udara	Transportasi Udara / 4646.CCL. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CCL.001. Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pemeliharaan Aplikasi Reporting Data Angkutan Udara	
5	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4611. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara / 4611.CCL. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4611.CCL.001. Operasional, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pembaharuan Aplikasi PAS Bandara berbasis Mobile	100,000,000
6	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Pengawasan (Simpanas)	200,000,000
7	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CBT.001. Software	Pembuatan Aplikasi Pelaporan dan Dashboard Monitoring Kegiatan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok	191,000,000
8	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CDS.001. OM Software	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Evaluasi Aplikasi BMN	184,212,000
9	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Pengembangan Sistem IWISH	2,000,000,000
10	022.05. Ditjen	4646. Keselamatan dan Keamanan	Pengadaan Perangkat	441,245,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

	Perhubungan Udara	Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Lunak Pemetaan Ruang Udara Indonesia	
11	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Pengembangan Sistem Sertifikasi Lalu Lintas Penerbangan	1,000,000,000
12	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Pengembangan Sistem APOLLO	1,500,000,000
13	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Pengembangan Sistem ANCIS	1,000,000,000
14	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Pengadaan Sistem Validasi Manajemen Ruang Udara	1,000,000,000
15	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sistem Pelaporan Kinerja Pengawasan Pelayanan Navigasi Penerbangan	1,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

		Transportasi Udara		
16	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Pengembangan Sistem Dashboard Direktorat Navigasi Penerbangan	1,000,000,000
17	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	Pengadaan Aplikasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP dan Reformasi Birokrasi	200,000,000
18	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	Pengadaan Aplikasi SSO (Single Sign On)	200,000,000
19	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan	450,000,000
20	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.001. Aplikasi TIK Bidang Angkutan	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	850,000,000
21	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.002. Aplikasi TIK Bidang Lalu Lintas	Pengadaan Perangkat Lunak Simulasi Transportasi	795,870,000
22	022.13. Badan Pengelola	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CCL. OM Sarana	Pemeliharaan E-Terminal di Jatijajar	198,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

	Transportasi Jabodetabek		Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CCL.002. Operasional Aplikasi TIK Bidang Lalu Lintas		
23	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Badan	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	Pengembangan Aplikasi Bus Tracking System	198,000,000
24	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Badan	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	Pembangunan Aplikasi Pengolahan Data dan Informasi	198,000,000
25	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Badan	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	Pengembangan Aplikasi Smart PJU	198,000,000
26	022.01. Sekretariat Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pembangunan web/mobile super apps layanan Kementerian Perhubungan	400,000,000
27	022.08. Ditjen Perkeretaapian	Ditjen	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	199,000,000
28	022.08. Ditjen Perkeretaapian	Ditjen	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian	662,000,000
29	022.01. Sekretariat Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan ESB Kementerian Perhubungan	200,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

30	022.08. Perkeretaapian	Ditjen	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Aplikasi Database Perencanaan Teknis Bidang Perkeretaapian	199,000,000
31	022.08. Perkeretaapian	Ditjen	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Database Perlintasan Secara Digital	1,182,335,000
32	022.08. Perkeretaapian	Ditjen	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	2,428,980,000
33	022.01. Jenderal	Sekretariat	1937. Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi / 1937.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1937.FAB.001. Sistem Informasi Investigasi	Pengembangan Sistem Informasi Investigasi	500,000,000
34	022.08. Perkeretaapian	Ditjen	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	Aplikasi Pengawasan Bidang Lalu Lintas Kereta Api	298,760,000
35	022.08. Perkeretaapian	Ditjen	4644. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian / 4644.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4644.FAB.001. Sistem Informasi Pemerintahan	Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online	1,261,150,000
36	022.01. Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Aplikasi Big Data	900,000,000
37	022.01. Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Aplikasi Inaportnet (Frontend)	420,000,000
38	022.01. Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan	Pengembangan Aplikasi	150,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

	Jenderal		Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	SIASATI	
39	022.01. Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Aplikasi SIMALIK	150,000,000
40	022.01. Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Aplikasi SIRIU	150,000,000
41	022.01. Jenderal	Sekretariat	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Integrated Planning Cycle System	150,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN II

NOMOR : 1038/DJAI/PR.01.01/12/2022

NOMOR : B/1406/KT.03/2022

TANGGAL : 14 Desember 2022

**HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DAFTAR INFRASTRUKTUR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan/KRO/RO	Infrastruktur	Anggaran
1	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4602.CDS.001. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Telkom Indonesia	2,779,458,000
2	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4665.CAN.951. Layanan Sarana Internal	Pengadaan Fasilitas Digital Forensic	1,700,000,000
3	022.01. Sekretariat Jenderal	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 1939.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Upgrade Kapasitas Modul UPS Data Center	299,700,000
4	022.01. Sekretariat Jenderal	1937. Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi / 1937.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1937.FAB.001.	Sekretariat KNKT	4,039,750,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

			Sistem Informasi Investigasi		
5	022.01. Sekretariat Jenderal		1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 1939.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data Kantor Pusat Kementerian Perhubungan	3,967,054,000
6	022.01. Sekretariat Jenderal		1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 1939.CBT.001. Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pembangunan Command Center Kementerian Perhubungan	4,500,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : 5/DJAI/PR.01.01/01/2023
Nomor : B/09/KT.03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran
Belanja SPBE Tahun 2023 di Lingkup
Kementerian Perhubungan

Jakarta, 02 Januari 2023

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/10 PTIKP.2022 Tanggal 02 November 2022 Perihal Permohonan Clearance Tahap II Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai surat nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 dan nomor S-353/MK.02/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai surat nomor 17 Tahun 2022 dan nomor 4 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

(*Clearance*) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE, melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>, dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
 - b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur TIK atau penambahan kapasitas yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2023 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
 - b. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan tidak dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran II surat ini;
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur TIK yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran III surat ini;

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- d. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi pada huruf a dan c, Kementerian Perhubungan agar melakukan:
1. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
 2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat Nasional;
 3. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
 4. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, agar dapat melanjutkan mata anggaran untuk kegiatan pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 huruf a dan c. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi <https://ega-spbe.layanan.go.id>.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

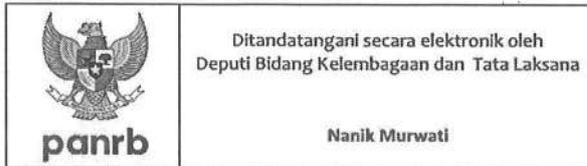
Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

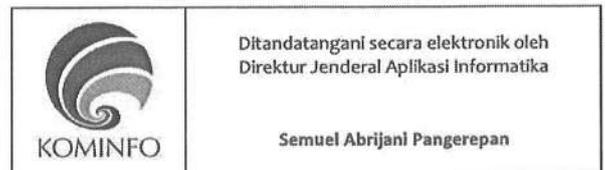


Balai
Sertifikasi
Elektronik

**Deputi Bidang Kelembagaan dan
Tata Laksana**



Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN I

NOMOR : 5/DJAI/PR.01.01/01/2023

NOMOR : B/09/KT.03/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan/KRO/RO	Aplikasi	Anggaran
1	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CCL. OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CCL.002. Operasional Aplikasi TIK Bidang Lalu Lintas	Pemeliharaan E-Terminal Poris Plawad	198,000,000
3	022.01. Sekretariat Jenderal	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Aplikasi E-Monitoring dan Reporting	150,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN II

NOMOR : 5/DJAI/PR.01.01/01/2023

NOMOR : B/09/KT.03/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK TIDAK DILANJUTKAN

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan/KRO/RO	Aplikasi	Anggaran
2	022.01. Sekretariat Jenderal	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 1939.FAB.001. Pengelolaan Sistem Informasi	Pengembangan Aplikasi Penilaian dan Perhitungan Kinerja Pegawai	150,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN III

NOMOR : 5/DJAI/PR.01.01/01/2023

NOMOR : B/09/KT.03/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (CLEARANCE)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR INFRASTRUKTUR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

No	Unit Kerja	Nama Kegiatan/KRO/RO	Infrastruktur	Anggaran
1	022.01. Sekretariat Jenderal	1937. Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi / 1937.BMA. Data dan Informasi Publik / 1937.BMA.001. Data dan Informasi Investigasi	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	500,000,000
2	022.01. Sekretariat Jenderal	1939. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi / 1939.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 1939.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan Infrastruktur HCI Data Center Kementerian Perhubungan	5,051,386,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi. Semakin Digital Semakin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3868159 www.kominfo.go.id

Nomor : 1037/DJAI/PR.01.01/11/2022 Jakarta, 14 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tanggapan Klarifikasi Atas Rekomendasi Sementara
Clearance Kementerian/Lembaga TA 2023

**Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal,
Kementerian Perhubungan
Di Jakarta**

Berdasarkan hasil rapat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 13 Desember 2022 terkait Klarifikasi Atas Rekomendasi Sementara Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2023, bersama ini disampaikan hasil pembahasan (tabel terlampir) untuk Kementerian Perhubungan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PAN RB, dan Tim Teknis Evaluasi Anggaran (*Clearance*) K/L TA 2023 dari Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dan Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan

Tembusan:

1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana



**Tabel Tanggapan Klarifikasi Atas Rekomendasi Sementara Clearance
Kementerian Perhubungan**

No	INSTANSI	PENGADAAN	ANGGARAN	SPESIFIKASI TEKNIS	PENJELASAN KEGIATAN	TANGGAPAN PENINJAUAN KEMBALI
1	KEMENHUB	Pengadaan Perangkat dan Pengembangan Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (Ditjen PL)	3,825,000,000	<p>High-performance Multi-Node 2U Servers</p> <p>1. Server Aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processor 48 Core (2 Socket) - Memory 256 GB DRAM - Memiliki kapasitas 4 x 1,9 TB SSD - Redundant Power Supply - 2 port 1/10GBase-T - 2 Port 10GbE SFP+ - Garansi 3 Tahun <p>Extended support 24x7</p> <p>2. Server Database</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processor 48 Core (2 Socket) - Memory 256 GB DRAM - Memiliki kapasitas 4 x 1,9 TB SSD - Redundant Power Supply - 2 port 1/10GBase-T - 2 Port 10GbE SFP+ <p>3. Extended garansi untuk exiting server</p> <p>4. L2/L3 Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Full line-rate L2 or L3 forwarding and switching - Hot-swappable, load-sharing, redundant AC PSUs - 48 x SFP+ switch port, supporting 10GbE (DAC, 10GBASE-SR/LR) or 1GbE (1000BASE-T/SX/LX) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Hardware Server eksisting merupakan milik DJPL dan merupakan Core System, terutama mendukung Program Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan</u> ▪ <u>Dalam mendukung Pusat Data Nasional, diperlukan DRC dari DC Kemenhub yang saat ini menjadi Core dari Kemenhub dan selanjutnya secara bertahap sampai menunggu proses migrasi PDN berjalan optimal sehingga tidak terdapat downtime yang dapat mengganggu keselamatan transportasi</u> ▪ <u>Hardware Server Bersama DC Kemenhub dalam pelaksanaannya dapat menjadi Pusat Data Nasional Sementara dalam mendukung kebutuhan hardware server</u> 	<p>Dapat Dilanjutkan,</p> <p>catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perhubungan harus menggunakan PDNS yang disediakan Kementerian Kominfo baik sebagai mirroring maupun sebagai backup layanan yang diselenggarakan. 2. Kementerian Perhubungan harus membuat perencanaan dan timeline proses migrasi layanannya ke PDN sehingga ANRI dapat sepenuhnya memanfaatkan PDN pada tahun 2024; 3. Kementerian Perhubungan harus berkoordinasi dengan Direktorat Layanan Aptika Pemerintahan Kementerian Kominfo Cq. Tim Pengelola PDNS dalam hal proses migrasi layanannya ke PDN dan/atau PDNS.

2	KEMENHUB	Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Electronic Seafarer Identity Document eSID ((Ditjen PL)	3,272,500,000	<p>HPE Proliant DL380 Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Electronic Seafarer Identity Document eSID</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosesor : HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 5218 (Up To 3.9 Mhz) - Power Supply : HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit 2 Buah - Expansion Slot : 8 Slots , HPE DL38X Gen10 12Gb SAS Expander - RAM : HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart 2 Slot Total 64GB - Storage / Harddisk : HPE 300GB SAS 10K SFF SC MV HDD 16 Slot Total 4.8 TB - Network Controller : HPE 1 Gb 331i Ethernet adapter 4-ports per controller and/or optional HPE FlexibleLOM, - Garansi Warranty : 3/3/3 - Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, three years of onsite support coverage - Sistem Operasi : Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std FIO Npi en SW 	<p>Solusi pengadaan perangkat tahun 2022 dan juga pengembangan sistem SID di tahun 2022 dan 2023 adalah menggabungkan dan memanfaatkan perangkat keras yang sudah ada menjadi backup sistem. Serta dengan adanya pengembangan tersebut akan berdampak pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supporting dari pihak dagang pada perangkat yang baru dan integrasinya - Upgrade sistem menggunakan microservice Based - Dapat mengakomodir banyaknya permohonan karena kebijakan, sebab terdapat pengembangan sistem daftar mandiri secara online - Pelayanan SID menjadi fleksibel karena pengembangan sistem berbasis web based - Implementasi ILO ICAO PKD Based akan menjadikan negara Indonesia masuk dalam jajaran negara white list ILO - <u>Proses instalasi yang mudah jika terdapat penambahan perangkat / UPT untuk penerbitan kartu SID</u> - Dengan adanya implementasi ICAO 9303 maka dokumen SID pelaut Indonesia dapat dilakukan verifikasi sesuai standar internasional di negara luar. - Standar security data kepelautan lebih terjaga dengan adanya teknologi HSM Hardware dan software DITKAPEL eksisting (SID) merupakan milik DITKAPEL dan 	
---	----------	--	---------------	---	--	--

					merupakan aplikasi utama penerbitan dokumen SID.
3	KEMENHUB	Pengembangan Infrastruktur HCI Data Center Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub - Pusdatin)	5,051,386,000	<ol style="list-style-type: none"> 1) High Availability 2) Integrated Backup and Recovery 3) Scheduled Backup 4) Ultra-Simplified Operation 5) High Performance 6) Server Virtualization 7) Storage Virtualization 8) Network Virtualization 9) Best NFV Integration 10) Effortless Operations 11) Flexible Scalability 12) SSD Capacity Optional 13) High Reliability 14) Reduced TCO 15) Easy System Health Check <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal form factor 2U. - Memiliki minimal 2 x CPU Intel Xeon Gold 4310 2.1G, 12C, 18MB - Memiliki minimal 256 GB Memory. - Memiliki minimal 12*3.5in disk slot dengan support 4 NVMe - Memiliki minimal integrated 2x480 GB SSD untuk OS. - Memiliki minimal 5 x SATA 8 TB 7200 RPM. - Memiliki minimal 1 x Intel NVMe 1.92 TB PCIe Gen4 x4 - Memiliki minimal 1 Raid Controller 12Gb 2 Port SAS LSI 9460 - Memiliki minimal 4 Port Gigabit 	<p><u>Pengadaan Server HCI ini merupakan salah satu bentuk mitigasi saat melakukan proses Migrasi ke Pusat Data Nasional.</u> Adapun beberapa aplikasi kritikal yang berkaitan dengan <u>payment gateway, data analytics platform, dashboard analytic splatform atau aplikasi</u> dengan integrasi data khusus atau dalam tahap awal implementasi dinilai masih perlu berada di Data Center Kemenhub. Dalam paparan justifikasi, <u>Pusdatin sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa aplikasi yang akan diusulkan migrasi ke PDN.</u> Penggunaan <u>HyperConverged Infrastructure (HCI) sebagai langkah mitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas layanan TIK kepada seluruh stakeholder yang memanfaatkan layanan-layanan kritikal yang ada di infrastruktur Data Center yang di Kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan sebelum dimigrasikan ke Pusat Data Nasional.</u> Adapun disampaikan dalam paparan justifikasi, <u>siswa resouce sudah sangat minim untuk konsep HCI sehingga dapat menyebabkan overload penggunaan resource virtual machine yang dapat berdampak pada keberlangsungan vm.</u> Sehingga diambil <u>kesimpulan bahwa pengadaan HCI amat</u></p>

			<p>Ethernet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki minimal 2 unit Dual Port 10 Gigabit Ethernet dengan SFP.- Memiliki minimal dual unit 1300 Watt Power Supply.- Termasuk dengan license hypervisor, license storage virtualization, dan license enhancement package.- Memiliki support minimal 3 tahun (NBD Onite) untuk hardware dan 1 tahun untuk software (24*7).- Termasuk pengiriman, instalasi dan layanan purna jual.- Surat Dukungan dari Prinsipal yang Berbadan Hukum Indonesia	<p><u>diperlukan saat ini sembari melakukan migrasi ke PDN.</u></p>	
--	--	--	--	---	--

4	KEMENHUB	Pemeliharaan E-Terminal Poris Plawad (Ditjen PD - BPTJ)	198,000,000	<p>pemeliharaan perngkat keras dan lunak di terminal poris plawad</p> <p>Perangkat pendukung itu antara lain :</p> <p>1.Vending machine Digunakan untuk mencetak boarding tiket bagi penumpang yang akan berangkat dari terminal. QR Code tersebut akan digunakan untuk masuk gate sebelum masuk ruang tunggu keberangkatan.</p> <p>2.Gate Merupakan perangkat yang digunakan untuk memastikan bahwa penumpang sudah membawa boarding tiket dan menempelkan barcode dalam mesin agar mesin gate terbuka.</p> <p>3.Komputer Lokal Merupakan perangkat pendukung dalam melakukan pengelolaan data dan informasi di lingkungan terminal.</p> <p>4.Jaringan / Network Jaringan digunakan sebagai sarana komunikasi bertukar data antara vending machine dan gate</p>	<p><u>Pemeliharaan E-Terminal Poris Plawad merupakan kegiatan perangkat keras yang mencakup vending machine, gate, komputer lokal dan jaringan / network di Terminal Poris Plawad, sedangkan aplikasi E-Terminal yang digunakan diseluruh terminal tipe A dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sehingga BPTJ hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan perangkat keras di terminal tipe A Jabodetabek.</u></p>	
---	----------	---	-------------	--	--	--

5	KEMENHUB	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	500,000,000	<p>-(NAS) RackStation RS3618xs sebanyak 3Unit</p> <p>- (HDD) WDC 12TB HGST Ultrastar 7200RPM SAS ULTRA 512E TCG P3 DC HC520 sebanyak 36 Unit</p> <p>- (PDU) APC Basic Rack PDU AP956</p> <p>- setting dan instalasi</p>	<p><u>KNKT dalam melaksanakan tugas investigasi saat ini masih memerlukan ruang penyimpanan data yang bersifat privat. Ruang tersebut khususnya untuk kebutuhan penyimpanan data hasil unduh Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (CVR) pesawat yang diinvestigasi KNKT. Batasan akses dan keterlibatan pihak di luar KNKT, selain diatur oleh peraturan internasional juga untuk meminimalisir tersebarnya isi dari data terkait. KNKT sampaikan, rekaman unduhan blackbox suatu pesawat adalah informasi yang sangat rahasia dan sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan korban suatu peristiwa kecelakaan. KNKT sangat menghargai rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemanfaatan infrastruktur Pusat Data Nasional yang berbasis awan. KNKT akan menggunakan fasilitas tersebut untuk penyimpanan semua data KNKT di luar data investigasi yang belum final (termasuk di dalamnya data unduh blackbox). KNKT akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika up Direktorat LAIP untuk pemanfaatan Pusat Data Nasional tersebut.</u></p>	
---	----------	--	-------------	---	---	--

Asisten Deputi
Perumusan Kebijakan
dan Koordinasi
Penerapan SPBE.



Cahyono Tri Birowo

Plt. Direktur Tata Kelola
Aplikasi Informatika

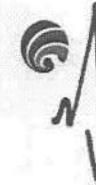


Ditandatangani secara elektronik oleh

Teguh Arifiyadi

Teguh Arifiyadi

Direktur Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan



Bambang Dwi Anggono